



Scholarium Dan Arena Produksi Pengetahuan

Oleh

Tom Setiawan

Pusat Studi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

tomi.setiawan@unpad.ac.id

Abstract

This paper is the result of a literature review that discusses the activity of scholarium and arena of knowledge production in university, specifically in the Majors of Rural Sociology, Bogor Agricultural University. The university in general is an institution with the highest respectability in the academic environment. Then the university became the instrument of social climbing for most people in developing country society. The objective difference in the science of Rural Sociology with other universities is in the context of 'agriculture'. More specifically Sajogyo then give eco-sociology term. Eco-sociology is applied sociology in the sociological sense that applied to human natural ecosystems. Furthermore, the reorientation of curriculum development should be presented as a collective development process and laid in the unity of theory and practice, and conceived as a constant dialogue among different scholars from different disciplines. In the end the benefit of science for the public is not denied, but the community needs should not be dictated to science as if intellectuals are no longer free to seek scientific truth as an end in itself, but the purpose of which is determined by the needs of the community.

Diterima : 20 Pebruari 2018

Direvisi : 12 Maret 2018

Diterbitkan : 31 Maret 2018

Kata Kunci :

Scholarium, Universitas,
Arena, Produksi
Pengetahuan.

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil kajian literatur kontemporer yang membahas tentang aktivitas *scholarium* dan arena produksi pengetahuan di universitas, khususnya di Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Universitas pada umumnya adalah institusi dengan tingkat kehormatan tertinggi di lingkungan akademis. Universitas sering kali menjadi alat pendakian sosial bagi kebanyakan orang di masyarakat negara berkembang. Perbedaan obyektif sosiologi Pedesaan dengan universitas lain adalah dalam konteks 'pertanian'. Lebih tepatnya Sajogyo kemudian memberikan istilah *eco-sosiologi*. *Eco-sosiologi* diterapkan sosiologi dalam arti sosiologis yang diterapkan pada

ekosistem alami manusia. Selanjutnya, reorientasi pengembangan kurikulum harus dipresentasikan sebagai proses pengembangan kolektif dan diletakkan dalam kesatuan teori dan praktik, dan dipahami sebagai dialog konstan di antara para ilmuwan yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu. Pada akhirnya manfaat sains bagi masyarakat tidak dipungkiri, namun masyarakat perlu tidak didikte ilmu pengetahuan seolah-olah para intelektual tidak lagi bebas untuk mencari kebenaran ilmiah sebagai tujuan itu sendiri, namun tujuannya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat.

Pendahuluan

Universitas¹ secara umum adalah sebuah institusi yang memiliki kedudukan kehormatan yang paling tinggi dalam lingkungan akademik. Peranan universitas tidak hanya sekedar apa yang terkait dengan pengajaran kepada mahasiswanya tetapi juga memiliki peran yang sangat dominan dalam meningkatkan kemampuan belajar suatu bangsa (*the learning capacity of nations*). Meskipun demikian peranan ini harus didukung pula oleh institusi-institusi yang lain di setiap lapisan masyarakat, untuk dapat menerima, mencerna, maupun menerima secara kreatif informasi dan pengetahuan baru. Dan sebaliknya universitas juga harus mampu memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan secara terus-menerus.

Universitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemampuan bangsa memiliki kemampuan untuk menjalankan *moral reasoning* sehubungan dengan pencapaian keadilan sosial. Proses pencapaian keadilan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan suatu bangsa. Secara lebih spesifik, suatu keadilan sosial dan kontinuitas moral kebudayaan adalah gambaran tentang diri sendiri dan kepribadian sendiri sebagai bangsa. Di samping itu, suatu kemampuan untuk menghubungkan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial kepada cita-cita moral adalah merupakan unsur-unsur dalam setiap usaha meningkatkan kualitas kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam konteks kehidupan masyarakat di negara berkembang, masyarakatnya memiliki ciri dominan yang sangat bergantung pada negaranya dalam menyediakan suatu keadaan kehidupan yang bermakna, dan pemuasan secara kultural dalam jangka panjang dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya melalui peningkatan pendapatan perkapita yang relatif tinggi bagi masyarakatnya. Demikian pula dengan keteraturan suatu

¹ Secara etimologi, universitas berasal dari bahasa latin yaitu '*universitas magistrorum et scholarium*', yang berarti komunitas guru dan akademisi.

masyarakatnya akan tergantung pula pada perubahan-perubahan dari struktur-struktur tradisional menuju komunitas-komunitas yang lebih maju dan unggul. Untuk kedua kondisi ini, bagian terpentingnya selalu disematkan dalam medium universitas. Pada titik inilah kemudian universitas dijadikan alat pendakian sosial (*social climbing*) bagi kebanyakan orang didalam masyarakat di negara berkembang.

Dalam konteks *social climbing* ini menurut Soedjatmoko (1996), universitas bisa menyumbang 30 juta kesempatan kerja selama 30 tahun. Universitas menjadi alat untuk memperbaiki kemampuan kerja (*employability*) seseorang dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pada sisi yang lain, universitas juga pada akhirnya akan mampu berkontribusi pada penyelesaian masalah kesempatan kerja dan keadilan sosial². Sayangnya kondisi ini juga menjadi penyebab tereduksinya fungsi ideal universitas kedalam fungsi ekonomi semata.

Kenyataannya universitas bukan lagi arena untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian) tetapi menjadi wilayah perebutan kekuasaan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan (*stakeholder*). Para *stakeholder* ini meliputi negara, pasar, dan *civitas* akademiknya yang kemudian saling berebut sumber daya yang ada di universitas tersebut. Negara melakukan intervensi terhadap kebijakan pendidikan tinggi -termasuk kurikulum, maupun sistem-sistem penjaminan mutu dan kebijakan lainnya- dengan kompensasi dalam aspek pembiayaan yang diberikan oleh negara. Pada sisi pasar, adanya tuntutan dalam kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginannya sesuai kebutuhan korporasi³. Dan pada sisi *civitas* akademiknya, pada akhirnya lebih fokus dalam mengabdikan pada sumber-sumber ekonomi dengan pengajaran dan penelitian sebagai sarannya.

² Dalam buku Soedjatmoko. 1996. *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan Tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

³ Misalnya *link and match* dengan pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki.

Sisi buruk terparah bagi universitas ketika dipaksa sebagai medium *social climbing* ini adalah, terjadinya komodifikasi pada kegiatan pendidikan dan penelitian atau dengan meminjam istilahnya Heru Nugroho⁴ terjadinya ‘McDonalisasi pendidikan tinggi’⁵. Komodifikasi ini telah menjadikan universitas sebagai pemilik komoditas gelar yang bisa diperjualbelikan. Dan dengan kondisi itu, dosen disibukkan dengan aktivitas mengajar yang panjang seperti halnya pekerja pabrik dengan keahlian mengajar dan menjadi peneliti mekanik, tanpa adanya penelitian sejalan dengan kompetensinya demi menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana program studi pedesaan di IPB saat ini dalam menyikapi kondisi yang demikian tersebut?

Metode

Tulisan ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Desain studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Creswell, 2010). Studi literatur yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur ini menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, informasi internet dan pustaka lainnya. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan informasi yang ada kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Produksi Ilmu Sosial dan Penetrasi Ideologi Negara

Secara umum, perkembangan ilmu sosial di Indonesia sejak sebelum revolusi kemerdekaan sampai serang tidak lepas dari pengaruh kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Kepentingan ini dapat dirumuskan ke dalam pola sederhana misalnya,

⁴ Nugroho, Heru. 2006. *Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan*. Dalam: Hadiz, Verdi R. dan Daniel Dhakidae. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.

⁵ McDonalisasi pendidikan tinggi adalah istilah sinis yang menggambarkan universitas sebagai pemilik banyak outlet, yang menyediakan pendidikan cepat saji, yang dapat dibeli dimana saja dan kapan saja.

demikian menciptakan pemerintahan yang stabil, pengumpulan pengetahuan masyarakat tradisional, modernisasi masyarakat tradisional, industrialisasi dan pembangunan bangsa. Sementara disisi lain ideologi yang di anut oleh pemerintah yang sedang berkuasa ternyata menentukan juga corak perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.

Dalam menganalisis penetrasi ideologi ke dalam produksi ilmu sosial ini akan didasarkan pada dua asumsi dasar. *Pertama*, setiap aktivitas ilmu dapat menyerap atau menyebarkan atau menyebarkan dari satu nilai ideologi yang tidak saling mendukung dengan atau tanpa disadari oleh ilmuwan yang menerapkannya. Setiap cabang ilmu pengetahuan juga rentan terhadap pengaruh berbagai ragam ideologi yang tidak serasi. Oleh karena itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat akan dijumpai beragam ideologi yang berbeda-beda. *Kedua*, dalam sebuah masyarakat akan sangat mungkin ada sebuah ideologi yang sementara waktu relatif lebih dominan dibanding dengan yang lain. Dan semakin stabil sebuah masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, biasanya terdapat satu ideologi yang relatif kuat dan langgeng.

Dalam masyarakat dewasa ini terjadi perubahan dalam berbagai bidang termasuk ideologi, sehingga akan terjadi beberapa ideologi saling berkontestasi untuk mencapai posisi yang dominan. Hasrat untuk mendominasi itu bisa tercapai baik dengan jalan damai ataupun dengan cara kekerasan. Kondisi Indonesia sejak lahirnya orde baru, dapat diidentifikasi satu ideologi yang dominan, satu ideologi yang kuat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebuah ideologi yang sangat populer dengan nama 'ideologi *developmnetalisme*'. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial sangat dipengaruhi dan mengikuti corak ideologi tersebut. Dalam konteks penetrasi ideologi ini, menurut Althusser (2007) lembaga pendidikan juga layak diperhitungkan secara serius. Proses pendidikan yang terjadi bisa menjadi suatu wahana yang penting bagi pertumbuhan dan penyebaran ideologi.

Selama periode pasca kolonial, ilmu sosial di Indonesia telah menjadi alat bagi negara untuk memberikan pembenaran politik atau kebijakan negara. Sementara itu pada masa orde lama terdapat beberapa ideologi yang berkontestasi, akan tetapi sejak dimulainya orde baru hanya terdapat satu ideologi yang dominan⁶, yaitu ideologi *developmnetalisme*. Ideologi *developmnetalisme* yang berkembang proses teknokratik

⁶ Secara historis, di awal pemerintahannya, orde baru adalah kekuatan yang berhasil menyatukan unsur yang dominan dalam masyarakat. Meskipun pada periode selanjutnya unsur-unsur tersebut tidak statis dan setara, bahkan kemudian sebagian ada yang ditonjolkan dan sebagian lain ada yang ditindas sesuai dengan kebutuhan kekuasaan.

berpadu dengan militeristik ala Jawa. *Developmnetalisme* merupakan salah satu model teknokratisme yang bekerja secara sekuler, menurut hukum dan kaidah yang bersifat universal, dan netral dalam dirinya sendiri, dengan sebuah keyakinan bahwa alam adalah sebuah berkah yang tersedia bagi manusia untuk digarap dan dimanfaatkan.

Dengan keyakinan tadi, pemerintah orde baru mempunyai komitmen untuk melakukan perluasan infrastruktur pendidikan dan ilmu pengetahuan, meskipun jenis pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah hanya yang dianggap netral, dan bisa dengan mudah dikendalikan oleh ideologi penguasa. Oleh karena itu, dalam penerapan ideologi yang diusung orde baru dengan sangat mudah dijumpai suatu praksis impor ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara barat, dan dengan itu diharapkan menjadi suatu alat yang kokoh, berdaya berat, hebat sekaligus memiliki nilai kepatuhan. Sebagai contoh kasus, di masa orde baru, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang secara besar-besaran, jauh melampaui skala pengembangan di bidang ilmu sosial, mensponsori rekayasa bahasa nasional. Hasilnya adalah sebuah pencucian ingatan atas unsur-unsur politis atas masa lalu melalui penggunaan bahasa negara.

Pengaruh ideologi negara dapat dijelaskan dengan melihat pendapatnya Michael Morfit (dalam Hadiz dan Dhakidae, 2006) bahwa pada masa orde baru hampir di setiap kementerian mendirikan satu bidang yang bernama bagian penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan sebagai penelitian yang berorientasi pada garis kebijakan negara. Pada umumnya kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh negara, diadakan sekedar sebagai formalitas untuk melengkapi suatu proyek pembangunan dan bukan sebagai kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengejar kebenaran sampai titik terjauh yang mungkin bisa dicapai. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu tidak menjadi alat untuk menguji validitas dan konsistensi ilmu pengetahuan serta dalam mengisi ruang-ruang yang belum teridentifikasi. Bentuk penelitian sering kali berupa survei kelayakan sebuah proyek, atau evaluasi setelah proyek dilaksanakan. Semuanya sangat mekanistik, terpusat pada pengumpulan data kuantitatif dan tanpa disertai pemeriksaan yang seksama dan kritis terhadap tingkat validitas dan konsistensinya.

Hasil kerja penelitian yang demikian pada akhirnya tidak terlalu dipedulikan oleh kementerian yang memesan, dan hampir tidak memiliki pengaruh pada kebijakan pemerintah yang sering kali diorientasikan pada pertimbangan politis. Hasil-hasil penelitian ini juga sering tidak dipublikasikan, sehingga tidak bisa dikaji secara kritis

oleh masyarakat ilmuwan secara luas. Meskipun demikian, tidak semua hasil penelitian yang dihasilkan adalah buruk, terdapat beberapa penelitian yang berhasil merumuskan semangat teknokrasi dan modernisasi, salah satunya adalah Koentjaraningrat. Oleh karena langkanya pemikiran yang relevan pada kebutuhan modernisasi teknokratis dibawah rezim militer orde baru, serta tingginya kebutuhan untuk mengadakan penelitian sebagai bagian dari “proyek”, gagasan Koentjaraningrat menjadi model yang direproduksi secara asal dengan distorsi metodologis yang disesuaikan dengan kebutuhan praksis diberbagai kalangan.

Negara pada akhirnya mampu merekayasa sebagian disiplin Ilmu sosial terutama Ilmu ekonomi dalam usaha membangun legitimasi pembangunan. Menurut Hadiz dan Dhakidae (2006) rekayasa ilmu sosial ini mencakup tiga aspek yaitu, ‘legitimasi kebijakan’, ‘penempatan posisi kelompok-kelompok strategis’, dan ‘batasan kewenangan negara’. *Pertama*, aspek ‘legitimasi kebijakan’ ditopang oleh teori-teori modernisasi, yang terdiri teori pertumbuhan, dan teori modernisasi politik. teori-teori tersebut mendasarkan asumsinya pada peran negara yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tesis utama teorinya adalah modernisasi merupakan perubahan sosial yang dirancang menurut pola-pola yang telah ditentukan sebelumnya. Ekonom yang menjadi pendukung teori-teori ini kemudian berargumen bahwa telah terjadi peningkatan kemakmuran melalui peran negara dalam mengalokasikan sumber daya di sektor kebutuhan dasar.

Kedua, menyangkut ‘penempatan posisi kelompok-kelompok strategis’. Sebagaimana ditopang oleh teori modernisasi, sebagian lagi ditopang oleh konsep *quasi-corporatism* yang menempatkan negara sebagai representasi berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu pemerintah mendorong berbagai organisasi bagi kelompok-kelompok strategis. Sementara bagi golongan miskin, negara mendefinisikan dirinya sebagai pelindung kepentingan golongan miskin, tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat mempertanyakan model apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan kehendaknya.

Ketiga, aspek ‘batas wewenang negara’, pemerintah orde baru sangat berkepentingan terhadap batas wewenang negara untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya krisis legitimasi dan meningkatnya kekuatan oposisi. Usaha ini dilakukan dengan merekayasa perspektif komunitarian untuk mendefinisikan bangsa sebagai suatu kehidupan bersama, dimana konflik dan perbedaan kepentingan tidak ditonjolkan. Orde baru menterjemahkan hal tersebut ke dalam ideologi negara Pancasila yang paternalistik.

Kebersamaan adalah tema yang digunakan untuk membenarkan hegemoni negara. melalui mekanisme ini pemerintah mengatur aturan main dalam politik, alokasi ekonomi, dan legitimasi kekuatan sosial menurut definisi yang dirumuskan secara tertutup.

Keseluruhan sistem ini kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai politik negara pembangunan atau dengan istilah yang lebih singkat sebagai ‘ideologi *developmnetalisme*’. Ideologi ini menjadi populer di tingkat internasional, dan menjadi titik awal kebangkitan perekonomian di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia. Ilmu ekonomi Indonesia pada saat itu merupakan replikasi ilmu ekonomi yang sedang mendominasi pemikiran di barat. Para ekonom mendapat posisinya yang paling utama selama pemerintahan orde baru, karena penguasa orde baru mendapat legitimasinya dari perbaikan ekonomi sejak awal berkuasanya.

Walaupun terjadi perubahan diakhir kekuasaan orde baru, tetapi ideologi *developmnetalisme* menjadi satu-satunya ideologi yang berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Oleh karena itu kritik yang ditujukan kepada pemerintah selalu disertai dengan klitik dengan penalaran ideologi *developmnetalisme*. Sebaliknya, bagi pemerintah orde baru, kritik terhadapnya atas proyek-proyek pembangunan selalu dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Berbagai kehidupan yang lain, termasuk pada pengembangan ilmu sosial pada masa tersebut dituntut untuk tunduk dan mengabdikan kepada kekuasaan. Berbagai aktivitas yang terjadi semuanya berada dalam sebuah kerangka pemikiran tunggal yaitu “dalam rangka pembangunan..” (Hadiz dan Dhakidae, 2006).

Naiknya peran masyarakat sipil yang sering dianggap sebagai bangkitnya kelas menengah yang diajukan sebagai antitesis dari sebuah negara yang serba menguasai dan menindas. Di akhir kekuasaan orde baru tulisan yang menggambarkan kelas menengah mulai bermunculan, dan bukan suatu hal aneh bahwa pemikiran yang berkembang ini bersamaan dengan naiknya agenda neoliberal global yang berbasiskan deregulasi dan pasar bebas, sekaligus juga mengangkat kembali isu modernisasi dalam bentuk yang baru sebagai *neoinstitutionalism* dan *rational choice theory*, termasuk pula masuknya ide *postmodernism*.

Reformasi yang meruntuhkan tirani orde baru pada awalnya dianggap sebagai angin segar dalam perkembangan ilmu sosial. Akan tetapi, harus diakui bahwa sekarang ini yang terjadi adalah perpindahan dunia ilmu sosial dari tirani rezim otoriter ke rezim pasar. Namun demikian, perkembangan kebebasan berbicara sedang mencapai puncaknya.

Suasana diskusi, perdebatan, dan refleksi diri mengalami keleluasaan. Ilmuwan sosial tidak lagi merasa takut akan terkena hukuman subversif dari negara karena pernyataannya dimuka umum.

Meskipun demikian, Hadiz dan Dakidae ((2006) memberikan gambaran kondisi saat ini terkait perkembangan ilmu sosial, *pertama*, warisan orde baru masih berpengaruh sampai sekarang, meskipun saat ini berkembang suasana yang lebih terbuka dan ramah terhadap pemikiran kritis. *Kedua*, pada saat ini sedang berlangsung penyerbuan oleh bentuk-bentuk paling dogmatis dari neoliberalisme terhadap institusi-institusi pendidikan maupun institusi-institusi riset. Neoliberalisme yang telah membuat kekacauan di negara-negara lain akan segera membawa kerusakan yang lebih besar apabila dipaksakan masuk ke dalam institusi pendidikan maupun riset di Indonesia. *Ketiga*, ancaman terhadap perkembangan ilmu sosial datang juga dari semakin banyaknya riset praktis yang berorientasi pasar dengan melayani kebutuhan industri secara langsung. Hal ini akan berdampak pada perkembangan ilmu sosial yang instrumentalis dan pragmatis, serta tidak kritis dan reflektif.

Distingsi dalam Keilmuan Sosiologi Pedesaan IPB

Perbedaan (distingsi) obyektif dalam keilmuan sosiologi pedesaan IPB dengan universitas lain adalah pada konteks ‘pertanian’nya. Secara lebih spesifik Sayogyo kemudian memberikan istilah ekososiologi⁷. Ekososiologi adalah sosiologi terapan dalam arti sosiologi yang diterapkan –di kontekstualisasi pada dan berbahan baku dari-ekosistem human natural. Kemudian menurut buku pedoman program pascasarjana IPB, tujuan dari program pendidikan sosiologi pedesaan IPB secara normatif diantaranya adalah menganalisis masyarakat pedesaan dengan melukiskan dan menjelaskan dari segi mikro dan makro parameter sosial, ekonomi, budaya dan politik yang melingkupi masalah pembangunan manusia dan masyarakat pedesaan, dan mengawasi dan memahami proses akibat dan dampak perubahan sosial yang menyertai pembangunan.

Menurut Luthfi (2011) dapat dikatakan bahwa kemunculan sosiologi pedesaan di IPB adalah pelembagaan atas pengalaman partikular Sajogyo. Ilmu sosial di Indonesia (sosiologi) tidak pernah menjadi perhatian utama dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia sejak masa kolonial. Periode sebelum perang hingga tahun 1940-an tidak

⁷ Sayogyo. 2006. *Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi (petani dan Pedesaan Sebagai Kasus uji)*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.

memberikan pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung pada Sajogyo dalam merintis bidang sosiologi di Indonesia. Sajogyo mempelajari *Totale Landbouw*, sosiologi pedesaan yang dikembangkannya di IPB sesungguhnya bersifat ‘hibrid’, campuran sosiologi warisan negara industri dengan psikologi sosial, dan ilmu ekonomi pertanian.

Secara konkret analisisnya sering kali disebut ‘deskriptif’ sebab menjadi penganalisis masyarakat pedesaan yang mampu melukiskan dan menjelaskan masalah pembangunan manusia dan masyarakat pedesaan. Disebut ‘pengorganisasian’ karena dalam upaya memecahkan problem sosial yang dihadapi dilakukan dengan cara ‘penyuluhan’ (sebagai gerakan, bukan sosialisasi atau instruksi), sehingga dari situ didapatkan saran-saran (preskriptif) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal terakhirlah yang kemudian menjadi ciri menonjol dari sosiologi pedesaan ala Sajogyo yang dikenal dengan genre ‘sampaimana’. Dalam menguji tesis maupun disertasi di IPB, salah satu pertanyaan wajibnya adalah apakah pemikiran peneliti guna memecahkan persoalan (preskriptif) setelah didapatkan uraian-uraiannya (deskriptif). Dengan kata lain, ‘sampai mana’ hasil temuan itu dapat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini jugalah yang menjadikan sosiologi ala Sajogyo sebagai sebuah ‘sosiologi terapan’⁸.

Metode yang jamak digunakan dalam riset tesis maupun disertasi adalah ‘studi kasus’ dan ‘mikro’. Sementara itu, dalam rentang 20 tahun (1974-1994), tema yang dikaji adalah: peluang berusaha dan bekerja; masalah agraria; peranan wanita; group dan komunitas; nilai-nilai sosial-budaya; dan kependudukan. Jika diamati dari lima tema ini, tiga tema pertama adalah tema yang dimulai dan atau dilanjutkan oleh Sajogyo dalam riset-riset lainnya⁹. Imajinasi sosiologis Sajogyo yang dicerminkan dalam studi Sosiologi IPB adalah menonjolkan pemikiran tentang ‘golongan lemah pedesaan’. Dengan kata lain, imajinasi yang berguna layaknya busur mengarahkan perhatian seorang ilmuwan/peneliti ke mana anak panah dibidikkan, penting artinya untuk menentukan apakah realitas tertentu menjadi terlihat atau tak terlihat, diketahui atau sengaja diabaikan untuk tidak diketahui (*ignorance*). Realitas golongan lemah pedesaan itulah yang menjadi imajinasi sosiologi Sajogyo¹⁰.

⁸ Pidato Ilmiah Purna Bhakti Sajogyo tahun 1991 judul ‘Sosiologi Terapan’. Dalam: Luthfi, Ahmad Nashin. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Bogor: SAINS dan Pustaka iFada.

⁹ Ibid, h.82

¹⁰ Ibid, h.82-83

Sementara, pilihan cara kerja Sajogyo tercermin dalam kombinasi empat ganda (*combination of multiples*): *multiple teoretical perspective, multiple observers, multiple sources of data, dan multiple methodologies*. Pengalaman mengkombinasikan perspektif, peneliti, sumber data, dan metodologi ini sebenarnya lebih tampak dalam praktik penelitian di SAE dari pada di sosiologi pedesaan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab untuk yang terakhir, yang lebih mungkin dilakukan oleh para muridnya adalah menggunakan kombinasi berbagai metodologi (*survei, participant observation, life histories, wawancara dengan pihak ketiga, dan lain-lain*), dan kombinasi sumber data¹¹.

Pendapat lain dijelaskan oleh Tjondronegoro (2008), bahwa *research field* dan *area of concern* dari sosiologi pedesaan di IPB meliputi, (1) Studi Desa; misalnya terkait sikap dan kebutuhan masyarakat desa, memudarnya otonomi desa, manajemen pembangunan desa, tipologi dan potensi desa; (2) Agraria; misalnya masalah dan gejala konflik agraria, penataan kembali sistem agraria, aspek sosial ekonomi agraria, lembaga dalam reformis agraria, pengembangan wilayah; (3) Kelembagaan; misalnya sistem ekonomi tradisional, tata kelembagaan pedesaan, kesatuan adat tradisional, kepemimpinan desa; (4) Kependudukan dan Lingkungan Hidup; misalnya kependudukan dan pembangunan berwawasan lingkungan, pemukiman dan sebaran penduduk, swasembada pangan, aspek sosial budaya pelestarian lingkungan hidup; (5) Golongan Lemah Pedesaan; misalnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, petani marginal, pemberdayaan lembaga pedesaan; dan (6) Perubahan Sosial, misalnya revolusi hijau, polarisasi di pedesaan, kesempatan kerja di pedesaan, perubahan transisi industrial¹².

Pedagogi ala Sajogyo : Pola Pendidikan Sosiologi Pedesaan IPB

Persoalan perlunya sosiologi dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya untuk melakukan pribumisasi pengetahuan, alat-alat konseptual, dan pendekatan yang lebih memadai yang oleh Kleden diberi istilah dengan '*partikularisme*' didasarkan pada asumsi bahwa masalah sosial suatu negara tidak dapat dipecahkan dengan mengiakan sarana ilmu sosial yang telah dibakukan oleh komunitas akademik internasional. Sebaliknya masalah itu harus didekati dengan sarana metodologi yang lebih sesuai dengan '*kekhususan historis kultural dan kawasan sosio-geografis*'¹³.

¹¹ *bid*, h.83

¹² Tjondronegoro, S.M.P. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.

¹³ Kleden, Ignas. 1997. *Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam Nordholt N. S. dan Leontine Visser. 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara : Dari Partikularisme ke Univbersalisme*. Jakarta : Penerbit LP3ES.

Dalam konteks ini Kleden (1987) menjelaskan beberapa alasan perlunya melakukan pribumisasi ilmu sosial ini yaitu: pertama, bahwa ilmu sosial di negara dunia ketiga berasal dari barat. Kerangka teoritis, prinsip-prinsip metodologi serta pengetahuan teknik penelitian dibentuk ibarat. Alasan kedua, merupakan alasan yang lebih bersifat ideologis, yaitu adanya sikap inferioritas bahwa negerinya sudah biasa menjadi objek kolonisasi. Pada mulanya merupakan kolonisasi politis yang diikuti kolonisasi ekonomi, kemudian berubah menjadi kolonisasi budaya dan kolonisasi kognitif (ilmu pengetahuan). Dan alasan ketiga yang bersifat teoritis, hal ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan dalam menjelaskan teori-teori dalam ilmu sosial tetapi juga dalam implikasi politis dan implikasi nilainya¹⁴.

Selanjutnya, dalam pribumisasi ilmu sosial ini dapat berada pada tiga dimensi analisis, yaitu 'ideologi ilmu sosial', 'teori ilmu sosial' 'metodologi ilmu sosial'¹⁵. Pertama, 'ideologi ilmu sosial', ideologi pada konteks ini adalah preferensi nilai yang menentukan asumsi-asumsi dasar sebuah teori. Bagaimanapun seseorang tidak akan bisa menolak peranan nilai dalam dua aspek, yaitu dalam peranannya sebagai basis bagi sebuah teori, dan implikasi-implikasi yang timbul dari penerapannya. Dengan kata lain sejauh menyangkut dasar dampak dari ilmu sosial, maka tidak ada satu disiplin pun dalam ilmu sosial yang dapat bebas nilai (*value-free*), bebas kepentingan (*intertest-free*), dan bebas kekuasaan (*power-free*).

Kedua, 'teori ilmu sosial', dalam hal ini 'teori ilmu sosial' tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari sifatnya sebagai pencerminan pola berpikir tertentu atau suatu rangkaian kepercayaan tertentu yang dapat menjadi dominan dalam konteks ruang dan waktu. Dalam sebuah hubungan sistem hubungan kognitif, sebuah teori ilmu sosial memainkan peran ganda, yaitu melegitimasi atau justru menentang sistem kognitif yang merupakan asal dari mana teori itu muncul. Ketiga adalah 'metodologi ilmu sosial', hal ini dianggap sebagai batas dari pribumisasi ilmu sosial. Karena menurutnya metodologi ini adalah hal yang tidak bisa diindeginasikan karena merupakan kriterium satu-satunya yang dapat menjamin validitas sebuah penelitian¹⁶.

¹⁴ Misalnya Kleden mencontohkan hasil penelitian Gertz tentang kemiskinan di Jawa bahwa "*kemiskinan di Jawa merupakan sebuah produk dari sistem pertanian kolonial yang secara sistematis melumpuhkan kemampuan penduduk asli petani Jawa*".

¹⁵ *ibid*, h.21

¹⁶ *ibid*, h.23

Berbeda dengan Kleden dalam pribumisasi pada ‘metodologi ilmu sosial’, selain Smith (2005) yang menganjurkan ‘dekolonisasi metodologi’ seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Alatas (2010) juga memberikan kritik atas ‘metodologi ilmu sosial’ positivistik hingga ke tingkat dimana model-model masyarakat yang secara epistemologis dibangun atas ilmu fisik merintangi pemahaman interpretatif dalam situasi lokal. Alatas juga menyinggung masalah dekolonisasi ilmu sosial, pendapatnya yaitu “selama ilmu sosial tidak didekolonisasi, masyarakat *post-colonial* hanya akan berpartisipasi dalam pengembangan atau dalam metode ilmu sosial sebagai objek riset yang secara umum dilakukan oleh Amerika dan Eropa¹⁷. Dengan mengutip pendapat Zghal dan Karoui (1973) secara ekstrem “*dekolonisasi harus memiliki arti keterputusan dengan budaya barat*”¹⁸.

Dalam mengejawantahkan konsep pribumisasi, pemikiran Sayogyo dapat di telusuri dari karyanya yang berjudul ‘*Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pemberdayaan*’¹⁹. Pertama Sayogyo mengambil pelajaran dari buku ‘*Pendidikan Kaum Tertindas*’-nya Freire²⁰, dengan beberapa poin penting yang dirujuknya adalah bahwa Fraire sering mengingatkan bahwa dalam diri orang yang tertindas terdapat ‘penindas’, hal ini menegaskan keharusan perjuangan dalam mencapai kebebasan, sehingga bisa tercipta masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Sejauh ini pendidikan terus merefleksikan masyarakat yang berbasis kelas beserta dampak runtutannya berupa perang antar kelas, dan kekuatan pemaksa yang terinstitusionalisasi. Penting untuk melawan ketidakadilan dan kesenjangan sosial ini karena perlawanan tersebut menunjukkan gerakan menuju kualitas pendidikan yang lebih baik.

Lebih lanjut, perihal reorientasi pengembangan kurikulum perlu disajikan sebagai sebuah proses pengembangan kolektif dan diletakkan dalam kesatuan teori dan praktek,

¹⁷ *ibid*, h.89

¹⁸ Contoh ekstrim perlawanan terhadap diskursus kolonialisme dibidang humaniora dilontarkan oleh Zawiah Yahya yang menyerukan perlawanan yang memberikan referensi alternatif terhadap teks-teks Eropa dengan mendemistifikasi kekuatan kolonial, menolak marginalisasi penulis kolonialis terhadap suara-suara indigenis, dan mendestabilisasikan struktur teks yang ideologis.

¹⁹ Tulisan ‘*Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pemberdayaan*’ di dalam bab 3 buku Sayogyo. 2006. *Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi (petani dan Pedesaan Sebagai Kasus uji)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

²⁰ Freire, (Paulo Freire) adalah adalah seorang tokoh pendidikan Brasil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi (*self affirmation*) yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah, sebuah gagasan yang berasal dari kritiknya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas. Lihat dalam Collins, Denis. 2011. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiran*. Yogyakarta: Komunitas Apiru dan Pustaka Pelajar.

serta difahami sebagai sebuah dialog yang konstan diantara para ahli yang berbeda-beda dari disiplin ilmu pengetahuan yang berlainan pula, yang perlu bekerja keras untuk mengerti, menyiapkan, dan juga menciptakan. Usaha ini membutuhkan pemahaman tentang rasa transformasi yang radikal untuk membuat kurikulum, berpikir, dan menghidupi kurikulum dengan cara yang sangat berbeda dengan cara-cara konvensional untuk memandang kurikulum yang sesuai dengan kebudayaan yang ada.

Sayogyo lebih lanjut menjelaskan, pokok pikiran *pedagogi* (pendidikan orang dewasa) dari Freire, dalam sikap membela kelas-kelas bawah dengan profesionalisme baru dengan mendahulukan yang biasanya diakhirkan (*putting the last firsts*)²¹. Apabila dekontekstualisasi dalam memahami apa yang diistilahkan ‘*the last*’ tadi maka perlu juga mengikuti metode baru yaitu metode riset partisipatif (BBBS: belajar bersama, bertindak setara). Hal ini menunjukkan pentingnya untuk menemukan metode penelitian yang paling sesuai untuk ilmu-ilmu sosial. Dengan mengutip peribahasa dari Ki Hajar Dewantara -seorang *pedagog* perintis kelembagaan pendidikan Taman Siswa- pemikiran dalam ilmu pengetahuan harus mendasarkan diri pada etika dalam pendidikan dan pembangunan manusia.

Hal yang menarik dari tulisan Sayogyo ini adalah tentang penerapan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Kemudian menganjurkan agar konsep itu dilakukan dengan kegiatan kecil, sarana belajar, dan bekerja, kemudian membuka ruang bagi lembaga yang bersifat terbuka dan fleksibel, berperan sebagai fasilitator, dan meninggalkan gaya (lama) ‘penyuluhan’ yang menggurui dan lebih banyak berperan daripada mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dengan cara seperti inilah suatu kerangka *cognitive justice* dapat dicapai. *Cognitive justice* ini mencakup (1) semua bentuk pengetahuan adalah valid dan semestinya berdampingan dalam hubungan dialogis satu sama lain; (2) keadilan antar pengetahuan itu mencakup upaya memperkuat ‘suara mereka yang terkalahkan dan terpinggirkan’; (3) pengetahuan tradisional jangan dimuseumkan; (4) tiap warga, komunitas, negara, adalah seorang ilmuwan, dan setiap orang adalah ahli; (5) ilmu pengetahuan mesti membantu setiap orang baik laki-laki maupun perempuan; (6) semua cabang ilmu mesti disatukan menjadi suatu ‘heuristic’ yang positif untuk memperlancar dialog (Visvanathan, 1999).

²¹ Ibid, h.124

Peer Group sebagai Kontinuitas Pelembagaan Pengetahuan

Menurut Soetarto (2010) tidak adanya apa yang disebut *peer-group* dalam dunia kesarjanaan di Indonesia telah menyebabkan absennya kebiasaan untuk saling mengkaji dan mengomentari pemikiran para kolega di kalangan sarjana Indonesia. Sehingga, gagasan penting apapun (termasuk juga yang ‘tidak penting’) yang pernah dihasilkan pada akhirnya akan selalu menguap seiring waktu, atau hanya akan bertahan selama penggagasnya masih hidup. Tapi yang lebih fatal dari tidak adanya *peer-group* pada sebuah lingkungan akademik adalah pada akhirnya tak ada gagasan yang pernah benar-benar teruji di lingkungan bersangkutan. Gagasan yang pernah dicetuskan hanya akan beredar di kalangan para pendukungnya dan tak akan mendapatkan tanggapan yang berarti dari mereka yang tak menyepakatinya. Dalam dunia semacam itu tak ada baku dalih dan pertukaran gagasan yang bisa mengenali kekuatan dan kelemahan sebuah gagasan²².

Secara konseptual *peer group* adalah salah satu ciri yang dibentuk dalam perilaku sosial dimana perilaku kelompok tersebut akan mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai individu-individu yang menjadi anggotanya sehingga individu tersebut akan membentuk pola perilaku dan nilai-nilai yang baru yang pada gilirannya dapat menggantikan nilai-nilai serta pola perilaku yang dipelajarinya. Beberapa ciri dari *peer group* menurut Baron (2003) diantaranya, *pertama*, tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. *Peer group* terbentuk secara spontan. Di antara anggota kelompok mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ada satu di antara anggota kelompok yang dianggap sebagai pemimpin. Di mana semua anggota beranggapan bahwa dia memang pantas dijadikan sebagai pemimpin, biasanya individu yang disegani dalam kelompok itu. Semua anggota merasa sama kedudukan dan fungsinya.

Kedua, bersifat sementara, karena tidak ada struktur organisasi yang jelas, maka kelompok ini kemungkinan tidak bertahan lama, lebih-lebih jika yang menjadi keinginan masing-masing anggota kelompok tidak tercapai, atau karena keadaan yang memisahkan mereka. Yang terpenting dalam *peer group* adalah mutu hubungan yang berkualitas karena bersifat sementara. *Ketiga*, *peer group* mengajarkan individu tentang kebudayaan dalam arti yang luas. Dengan medium sosialisasi, di dalam *peer group* terjadi proses transmisi nilai-nilai, *belief system*, sikap-sikap kultural, ataupun perilaku-perilaku dalam

²² Soetarto, Endriatmo. 2010. *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*. Yogyakarta: STPN dan Sajogyo Institute.

kelompok sosial dimana perilaku berkelompok tersebut akan mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai individu-individu yang menjadi anggotanya sehingga individu tersebut akan membentuk pola perilaku dan nilai-nilai baru yang pada gilirannya dapat menggantikan nilai-nilai serta pola perilakunya²³.

Peer group bagi seorang ilmuwan adalah suatu komunitas ilmiah beserta atmosfer akademiknya dimana integritas dan kreativitasnya dapat direfleksikan secara kontinu. Oleh karena mereka yang secara kebetulan tergolong pada kelompok ilmuwan secara terus menerus mengarahkan pandangannya terhadap kemungkinan pengarah-pengarah dan tindakan dan perumusan pilihan-pilihan alternatif, maka kaum ilmuwan itu akan dengan mudahnya masuk ke dalam peranan sebagai pencipta timbulnya ilmu pengetahuan dalam komunitas *peer group*-nya. Dan sesungguhnya, itulah fungsi hakiki dan kreatif dalam melaksanakan peranan ilmuwan.

Apabila dihubungkan dengan politik sertifikasi dosen, akreditasi Program Studi, keberadaan BAN (Badan Akreditasi Nasional)-Dikti, formalisasi ‘pendidikan’ calon assessor, dll, kesemuanya itu bukanlah *peer group* yang hakiki. Itu adalah simbol keangkuhan kuasa negara dalam mendominasi aktivitas akademik para ilmuwan. Dengan ditopang oleh model *quasi-corporatism* yang menempatkan negara sebagai representasi berbagai kelompok sosial. Maka pada akhirnya pemerintah harus mendorong munculnya beragam organisasi dalam kelompok-kelompok strategis di lingkungan ilmuwan seperti BAN, Lembaga assesor, dll tadi beserta aturan kebijakan-kebijakannya, untuk memberikan *barrier* pada kelompok ilmuwan supaya tidak lepas dari pengaruh ideologi negara dan selalu tunduk pada negara.

Suatu produksi/reproduksi pengetahuan ketika harus memosisikan diri dan menyusun agenda ke depan maka harus dengan memahami kebebasan intelektual (*intellectual freedom*) yang dinyatakan sebagai penilaian personal (*personal judgement*) sesungguhnya adalah pengejawantahan dari makna ‘*hakikat*’ dalam ilmu pengetahuan. Menurut Polanyi (2009) segala bentuk pengetahuan adalah bersifat personal (*all knowledge is personal*). Kemudian ia menjelaskan bahwa metode ilmiah berjalan begitu saja, kecuali kalau metode ilmiah itu digunakan ilmuwan untuk menginterpretasi kenyataan. Tidak ada penilaian objektif yang sama sekali bebas dari kepentingan subjektif seorang intelektual. Sifat personal dalam ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan tidak “kebal” salah, karena apa yang benar diyakini melampaui apa

²³ Baron, Robert A., & Byrne, Donn. *Psikologi Sosial*. Edisi 10. Jakarta : Erlangga, 2003.

yang bisa dikatakan intelektual dan bahwa apa yang bisa diketahui ilmuwan lebih dari apa yang dapat dikatakannya²⁴.

Penilaian personal merupakan asumsi yang menentukan kebenaran ilmu pengetahuan sekaligus merupakan visi dan syarat-syarat untuk mencari alternatif metodologi. Kebebasan ilmu pengetahuan juga dikaitkan dengan spontanitas ilmuwan untuk menunjukkan aspek personal sebagai kebebasan intelektual. Institusionalisasi kebebasan ilmu pengetahuan misalnya dapat dilihat dari pembentukan organisasi ‘*The Society of Freedom in Science*’ yang didirikan Polanyi dengan maksud untuk melindungi ‘kebebasan privat melalui perhatian publik’. Melalui perhatian publik ini dapat dikonsepsikan bahwa penekanan kebebasan intelektual dan ilmu pengetahuan tidak bersifat “kebal” salah, tetapi terbuka bagi penilaian publik.

Kesimpulan

Menempatkan arena produksi pengetahuan pada tataran empiris-sosiologis didalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam wujud ‘*kesalahan sosiologis*’. Bagaimanapun, agama merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi ini turut pula mempengaruhi perkembangan dunia itu sendiri, dan demikian mempengaruhi pula jalannya sejarah. Kesalahan sosiologis terbentuk di dalam ruang kriteria yang tidak hanya diukur dari ibadah ritualnya, -seperti misalnya pada shalat dan puasanya-, tetapi yang lebih penting adalah dengan melihat dari output sosialnya atau nilai-nilai dan perilaku sosialnya, berupa kasih sayang pada sesama, sikap demokratis, menghargai hak orang lain, cinta kasih, penuh kesantunan, harmoni sosial dengan orang lain, memberi dan membantu sesama, dll. Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah, dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi saw dan berkata, “*Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? dan amal apakah yang paling dicintai Allah?*” Rasulullah menjawab, “*Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kedalam diri seorang muslim atau engkau hilangkan suatu kesulitan seseorang.*” (HR. Thabrani)²⁵.

²⁴ Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origin of Our Time*. Boston: Beacon Press

²⁵ Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al Albani didalam kitab “*at Targhib wa at Tarhib*” (2623)

Pada akhirnya, kemaslahatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat tidak disangkal, tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak boleh didikte ilmu pengetahuan seolah-olah intelektual tidak lagi bebas mencari kebenaran ilmiah sebagai tujuan pada dirinya sendiri, tetapi tujuan yang ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Pemahaman pengetahuan secara instrumental mereduksi pengetahuan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dan melegitimasi kebebasan ilmuwan menjadi mesin produksi kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Farid. 2010. *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan Terhadap Eurosentrisme*. Bandung : PT. Mizan Publika.
- Baron, Robert A., dan Byrne, Donn. 2003. *Psikologi Sosial*. Edisi 10. Jakarta : Erlangga.
- Collins, Denis. 2011. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiran*. Yogyakarta: Komunitas Apiru dan Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2011. *The Courage of the Truth*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hadiz, Verdi R. dan Daniel Dhakidae. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- _____. 1997. *Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam Nordholt N. S. dan Leontine Viser. 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara : Dari Partikularisme ke Univbersalisme*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Luthfi, Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*. Bogor: STPN Press bekerja sama dengan Pustaka Ifada.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Nasoetion, Andi Hakim. 1999. *Pengantar ke Filsafat Sains Bogor*: Litera Antarnusa.
- Nordholt N. S. dan Leontine Viser. 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara : Dari Partikularisme ke Univbersalisme*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Nugroho, Heru. 2006. *Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan*. Dalam: Hadiz, Verdi R. dan Daniel Dhakidae. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.

- Pidato Ilmiah Purna Bhakti Sajogyo tahun 1991 judul *Sosiologi Terapan*. Dalam: Luthfi, Ahmad Nashin. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Bogor: SAINS bekerja sama dengan Pustaka iFada.
- Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origin of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Sayogyo. 2006. *Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus uji)*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Sudarsana, I. K. (2018). Implikasi Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa.
- Sudarsana, I. K. (2018). PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA HINDU BAGI ANAK PANTI ASUHAN. *JCES/ FKIP UMMat*, 1(1), 41-51.
- Soedjatmoko. 1995. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- _____. 1996. *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan Tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Soetarto, Endriatmo. 2010. *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.
- Tjondronegoro, S.M.P. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.